

# The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory

**Didit Agus Triyono**

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi  
Universitas Diponegoro Semarang

**ABSTRACT:** *The four theories of press is an early theory of the press and journalism were first widely publicized in 1956 by Wilburm Schraamm, Fred. S. Siebert and Theodore Peterson. This press theory illustrates that the press describe the socio-political situation in a community. This is because the press reflect the social control system and the relationship between individuals and institutions. The fourth theory is really just a development of the two previous theories, such as an outgrowth of the Totalitarian Authotarian, while the Social Responsibility Theory (SRT) is an outgrowth of the libertarian theory of the press.*

**Keywords:** *The four theories of press, Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Theory, Totalitarian Media Theory*

## PENDAHULUAN

*The four theories of press* merupakan teori awal mengenai pers dan jurnalistik yang dipublikasikan secara luas pertama kali pada tahun 1956 oleh Wilburm Schraamm, Fred. S. Siebert dan Theodore Peterson. Teori pers ini menggambarkan bahwa pers menggambarkan keadaan sosial politik dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan pers merefleksikan sistem dan control sosial mengenai hubungan antara individu dan institusi (Siebert, Schramm, & Peterson, 1963: 1). Keempat teori ini sesungguhnya hanyalah perkembangan dari dua teori terdahulunya, seperti Totalitarian yang merupakan perkembangan dari Authotarian, sedangkan *Social Responsibility Theory* (SRT) merupakan perkembangan dari teori pers libertarian.

*The four theories of press* dikategorikan sebagai teori normative dikarenakan teori-teori ini mendeskripsikan norma; sesuatu yang seharusnya; kondisi idealnya. Teori normative memberikan gagasan mengenai bagaimana media harus dikelola dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik (secara luas) dimana teori pers itu berlaku (Littlejohn, 2009: 574).

Meski teori normative merupakan gambaran ideal bagaimana media dalam masyarakat bertindak, namun terdapat berbagai penyimpangan (di luar tujuan awal yang ideal). Oleh karena itu tulisan ini berniat untuk melakukan tinjauan literatur mengenai kelebihan dan kekuarangan dari *the four theories of press* atau yang dikenal juga dengan Teori Normatif Media tahap awal.

## I. Authoritarianism Media Theory (Pers Otoriter)

Teori otoritarian, merupakan teori normative yang menempatkan semua bentuk komunikasi dibawah kontrol elit pemerintah/otoritas.

Teori ini pada mulanya berkembang di negara-negara monarki di Eropa, dimana kerajaan dan gereja merupakan otoritas tertinggi di suatu negara. Aplikasi teori ini dimulai pada abad 16 di Inggris, Perancis, dan Spanyol, yang pada zaman berikutnya meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, dan Negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin.

Pada mulanya, teori otoritarian ingin menciptakan kondisi ideal melalui informasi yang disaring oleh pemegang otoritas (pada umumnya Raja/petinggi negara atau pihak yang diatur dalam peraturan sebagai praktisi media) dengan tujuan melindungi dan memelihara tatanan sosial (Baran & Davis, 2012: 102).

Namun pada perkembangannya, pers otoritarianisme menjadi suatu bentuk perangkat penekanan dan ketertundukan kepada pemerintah. Di dalam teori ini sensor dan hukuman dari pedoman yang telah ditetapkan berlaku untuk hal hal yang sifatnya politis atau segala sesuatu yang memiliki ideologi jelas.

Model komunikasi yang terjadi pada paham otoritarianisme adalah komunikasi satu arah. Dalam menjalankan tugasnya baik dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pesan, orang otoritarian hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien. Meski kebebasan bersuara dibatasi, namun selama pandangan (termasuk kaum minoritas) yang dikemukakan tidak mengancam pemerintahan masih diperbolehkan.

Teori otoriter yang acapkali disebut pula sistem otoriter berkaitan erat dengan sistem pengawasan terhadap media massa yang daya pengaruhnya dinilai amat kuat, sehingga pers dijuluki the fourth estate (kekuasaan keempat) dan radio siaran dijuluki the fifth estate (kekuasaan kelima) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing diakui sebagai kekuasaan pertama, kedua dan ketiga.

Menurut Fred S. Siebert teori otoriter menyatakan bahwa hubungan antara media massa dengan masyarakat ditentukan oleh asumsi-asumsi filsafati yang mendasar tentang manusia dan negara. Dalam hal ini tercakup: (1) sifat manusia, (2) sifat masyarakat, (3) hubungan antara manusia dengan negara, dan (4) masalah filsafati yang mendasar, sifat pengetahuan dan sifat kebenaran.

Teori otoriter mengenai fungsi dan tujuan masyarakat menerima dalil-dalil yang menyatakan bahwa pertama-tama seseorang hanya dapat mencapai kemampuan secara penuh jika ia menjadi anggota masyarakat. Sebagai individu lingkup kegiatannya benar-benar terbatas, tetapi sebagai anggota masyarakat kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan dapat ditingkatkan tanpa batas. Atas dasar asumsi inilah, kelompok lebih penting daripada individu, karena hanya melalui kelompok seseorang dapat mencapai tujuannya.

Teori tersebut telah mengembangkan proposisi bahwa negara sebagai organisasi kelompok dalam tingkat paling tinggi telah menggantikan individu dalam hubungannya dengan derajat nilai, karena tanpa negara seseorang tak berdaya untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia beradab. Kebergantungan seseorang pada negara untuk mencapai peradaban telah menjadi unsur utama bagi sistem otoriter. Saat ini penyensoran, baik oleh pemerintah maupun swasta, masih hidup dan berkembang di

berbagai belahan dunia, termasuk yang menyatakan yang menganut demokrasi. Misalnya perselisihan yang sering terjadi antara wartawan dengan pemerintahan Singapura yang terkenal dengan kontrol media yang ketat dimana petugas berwenang melakukan sensor atau pengeditan pada program dan pengeditan. Harian seperti *Asian Wall Street Journal*, *Far Eastern Economic Review*, dan *International Herald Tribune* merupakan harian yang pernah berselisih dengan pemerintah Singapura, dan harus membayar denda serta menghadapi kontrol yang ketat.

#### Kelebihan dan Kekurangan Teori Otoriter

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat</li> <li>Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan konsensus yang diharapkan pada negara sedang membangun yang memerlukan kestabilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan pandangan/ pendapat</li> <li>Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah mapan</li> <li>Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi</li> </ul>

## II. Libertarianism Media Theory (Pers Liberal)

Paham libertarianisme muncul sebagai reaksi penolakan terhadap paham otoriterisme pada akhir abad ke-17. Kaum libertarian berpendapat bahwa sifat alami individu untuk mencari kebenaran untuk mendapatkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik. Pencarian kebenaran ini harus diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan berdebat mengenai "truth" ini sendiri melalui proses *self righting* (Baran & Davis, 2012: 103). Menurut John Milton, libertarian vokal pada 1644 menyatakan bahwa debat yang adil dan terbuka, kebenaran dan argumen yang jujur akan selalu menang dibandingkan kebohongan (Baran & Davis, 2012: 102).

*Libertarian theory* menjadi dasar modifikasi *social responsibility theory*, dan merupakan kebalikan dari *Authoritarian Theory* dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kebenaran bukan lagi milik kodrati manusia. Dan pers dianggap partner dalam mencari kebenaran.

Pers dalam negara yang menganut paham libertarianisme harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Pers dituntut untuk mengawasi pemerintah. Maka lahir istilah pers sebagai *The Fourth Estate* atau pilar kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Oleh karena itu, John Keane-*Media Democracy* ((1991) dalam Baran & Davis, 2012: 103) menyatakan setidaknya harus ada 3 konsep fundamental dalam kebebasan pers:

1. Teologi: memberikan forum bagi masyarakat untuk menilai **baik** dan **buruk**
2. Kebebasan individu: kebebasan pers merupakan yang terkuat, setidaknya kebebasan dari elit politik
3. Kebenaran: kebohongan dan hal-hal yang salah harus dilawan, suatu gagasan harus dapat diperdebatkan dan diuji, jika tidak hal itu hanya akan menjadi dogma

Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada **pasar bebas** pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Selain memberi hak warga untuk bersuara dan kontrol sosial, pers dalam paham libertarianisme bertugas **(1)** melayani kehidupan politik, **(2)** mencari keuntungan, **(3)** member hiburan.

Perjuangan untuk mengakui prinsip-prinsip liberal yang mempengaruhi pers itu. Mencapai puncaknya dengan diformulasikan dan diterimanya *Bill of Rights* yang Mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan kebebasan pers, meski tidak Tegas sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Dari sejumlah butir yang tercakup Oleh *Bill of Rights* itu, hanya satu butir yang tampaknya diterima tanpa interpretasi, yakni bahwa kebebasan pers tidak mutlak, melainkan dapat dikenakan pembatasan yang bagaimana Yang dapat dikenakan pembatasan; tetapi pembatasan yang bagaimana yang dapat dikenakan Kepada pers, dalam liberalisme menjadi permasalahan. Fungsi pers menurut teori liberal dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mengabdikan kepada sistem politik dengan menyajikan informasi, diskusi dan debat mengenai peristiwa umum;
- b) Menyebarkan penerangan kepada khalayak agar mampu berpemerintahan sendiri;
- c) Mengawal hak-hak asasi pribadi dengan mengabdikan kepadanya sebagai penjaga dalam menghadapi pemerintah;
- d) Mengabdikan kepada sistem ekonomi, terutama dengan jalan memper satukan para pembeli dan penjual barang dan jasa melalui media periklanan;
- e) Menyajikan hiburan;
- f) Mengusahakan dana bagi kebutuhan sendiri sehingga bebas dari tekanan pihak yang berkepentingan.

Ciri pers liberal yang memiliki kebebasan publikasi dari penyensoran dan tidak adanya batasan hukum dalam mencari berita menjadikannya sebagai kelebihan sekaligus kekuarangan. Berikut ini rangkuman kekurangan dan kelebihan pers liberal (dalam Baran & Davis, 2012: 120):

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media memiliki kebebasan</li> <li>• Menghindari control pemerintah terhadap media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat optimis bahwa media dengan sadar memiliki tanggung jawab</li> <li>• Sangat optimis bahwa tiap individu memiliki rasionalitas dan etikanya sendiri</li> <li>• Mengabaikan konflik yang muncul dari kebebasan mencari kebenaran (misal, kebebasan pers vs. ruang privat)</li> </ul>

### III. Social Responsibility Theory (Pers Tanggungjawab Sosial)

Muncul pada abad ke 20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Di abad ini, ada gagasan yang berkembang bahwa media satu-satunya yang dilindungi piagam hak asasi manusia, harus memenuhi tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial, yang merupakan gagasan evolusi praktisi media, dan hasil kerja komisi kebebasan pers (*Comission on Freedom of The Press*), berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan

informasi, menghibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam buku "Four Theories of the Press" oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal.

Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.

Fungsi-fungsi pers dalam Teori Tanggung Jawab Sosial pada dasarnya adalah sama dengan fungsi dalam Teori Liberal yang telah diterangkan tadi, tetapi Teori Tanggung Jawab Sosial merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan petugas pers.

Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri, maka dibentuklah *Commission on Freedom of the Press*. Komisi Kemerdekaan Pers itu telah merumuskan lima persyaratan pers yang menurut analisis Theodore Peterson adalah sebagai berikut:

- a) Syarat pertama, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna.
- b) Syarat kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
- c) Syarat ketiga, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat.
- d) Syarat keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
- e) Syarat kelima, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari.

Dilema yang muncul atas kebebasan mencari kebenaran dalam teori liberal menjadikan munculnya teori tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Theory*). Dalam SRT, media tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. Karena apa yang disampaikan melalui media selalu memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat.

Konsep tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat.

Menurut Theodore Peterson (dalam, Siebert, Peterson, & Schramm, 1963:74), perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah, "*media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do.*" Selanjutnya mereka menyatakan bahwa, media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen (*consumer action*), etika profesional, dan, dalam kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis dalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi.

Namun demikian, tanggung jawab media dalam teori tanggung jawab sosial sulit untuk dioperasionalkan, akibat rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan. Oleh karena itu, sistem ini berada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan libertarian. Maksudnya, jika

pemerintah ikut campur dalam merumuskan fungsi, tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya, maka sistem ini menyerupai otoritarian. Sebaliknya, jika para jurnalis dan media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistem itu bergerak ke arah liberatarian.

Teori yang sempat menjadi teori normatif di Amerika Serikat pada tahun 1940-an ini menghadapi kendala utama yaitu "tidak menguntungkan". Misalnya dalam menyuarakan suara kaum minoritas dan menyeimbangkan pemberitaan yang terlalu bersifat drama, Kritikus media Gaye Tuchman dan W. Lance Bennet (dalam Baran & Davis, 2012:129) menyatakan hal yang seperti itu tidak disukai pengiklan secara demografis.

Berikut ini rangkuman sederhana mengenai kelebihan dan kekurangan SRT (Baran & Davis, 2012: 121):

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjunjung tanggung jawab media</li> <li>• Menjunjung tanggung jawab audiens</li> <li>• Membatasi ikut campur pemerintah dalam media</li> <li>• Memberi ruang pemerintah mengawasi media</li> <li>• Menjunjung perbedaan dan pluralism</li> <li>• Memberikan ruang kaum "powerless"</li> <li>• Menarik "insting" kreatif praktisi media dan audiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelewat optimis terhadap kesadaran media terhadap tanggung jawabnya</li> <li>• Kelewat optimis terhadap tanggung jawab individu</li> <li>• Meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit dan kompetisi</li> <li>• Melegitimasi <i>status quo</i></li> </ul>

#### IV. Totalitarian Media Theory (Pers Totaliter)

Dikenal juga dengan *The Soviet-Communist Theory*. Totalitarian media theory di kembangkan pada masa nazi atau pada masa komunis (Siebert, Peterson, dan Scramm 1963: 105) disebut sebagai penindasan dari kelompok plural dan kebutuhan yang tinggi untuk propaganda kuat dan di pusatkan pada budaya politik. Kontrol langsung media oleh kekuasaan politik dominan di lihat sebagai sebuah usaha untuk mencegah adanya penyimpangan, dipandang sebagai musuh dari manusia. Para anggota nasionalis sosialis komunias harus percaya dengan adanya total control yang berlebihan dari media , dan ini bisa mendidik masyarakat dan memimpin mereka ke masa depan yang di inginkan (Baran & Davis, 2012: 92).

Perbedaan teori soviet dengan teori otoriter adalah dalam teori soviet, media tidak merupakan subyek dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak di perkirakan sebelumnya. Media diharapkan melayani dan bertanggung jawab kepada publik mereka, media biasanya tidak monolitik (meskipun bila dalam keberagaman terbatas dan tidak diperkenankan untuk timbul secara leluasa) dan mereka mengungkapkan aneka ragam kepentingan. Postulat teori ini bisa di rumuskan sebagai berikut:

- 1) Media seyogyanya melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian, kelas pekerja;
- 2) Media seyogyanya tidak dimiliki secara pribadi;
- 3) Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang di inginkan, pendidikan, informasi, motivasi dan mobilisasi;

- 4) Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media seyogyanya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiencenya;
- 5) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi, anti masyarakat;
- 6) Media perlu menyediakan pandangan yang purna (complete) dan objektif tentang masyarakat dan dunia dalam batas prinsip marxisme-leninisme;
- 7) Wartawan adalah ahli yang bertanggung jawab yang tujuan dan cita-citanya seyogyanya serupa dengan kepentingan terbaik masyarakat;
- 8) Media hendaknya mendukung gerakan progresif di dalam dan di luar negeri;

## PENUTUP

Dalam suatu teori, pada mulanya selalu menginginkan kondisi ideal. Namun dalam perkembangannya selalu ditemukan kesalahan, penyimpangan dari apa yang diidealkan. Oleh karena itu teori normative media sangat dinamis dan terus berkembang dengan tujuan perbaikan-perbaikan dibandingkan yang terdahulunya.

Guna mempermudah memahami teori-teori normative media tahap awal, berikut tabel ringkasan *The Four Press Theories* (dalam Siebert, Peterson, & Schramm, 1963: 3)

FOUR RATIONALES FOR THE MASS MEDIA				
	AUTHORITARIAN	LIBERTARIAN	SOCIAL RESPONSIBILITY	SOVIET-TOTALITARIAN
Developed	in 16th and 17th century England; widely adopted and still practiced in many places	adopted by England after 1688, and in U.S.; influential elsewhere	in U.S. in the 20th century	in Soviet Union, although some of the same things were done by Nazis and Italians
Out of	philosophy of absolute power of monarch, his government, or both	writings of Milton, Locke, Mill, and general philosophy of rationalism and natural rights	writing of W. E. Hocking, Commission on Freedom of Press, and practitioners; media codes	Marxist-Leninist-Stalinist thought, with mixture of Hegel and 19th century Russian thinking
Chief purpose	to support and advance the policies of the government in power; and to service the state	to inform, entertain, sell — but chiefly to help discover truth, and to check on government	to inform, entertain, sell — but chiefly to raise conflict to the plane of discussion	to contribute to the success and continuance of the Soviet socialist system, and especially to the dictatorship of the party
Who has right to use media?	whoever gets a royal patent or similar permission	anyone with economic means to do so	everyone who has something to say	loyal and orthodox party members
How are media controlled?	government patents, guilds, licensing, sometimes censorship	by "self-righting process of truth" in "free market place of ideas," and by courts	community opinion, consumer action, professional ethics	surveillance and economic or political action of government
What forbidden?	criticism of political machinery and officials in power	defamation, obscenity, indecency, wartime sedition	serious invasion of recognized private rights and vital social interests	criticism of party objectives as distinguished from tactics
Ownership	private or public	chiefly private	private unless government has to take over to insure public service	public
Essential differences from others	instrument for effecting government policy, though not necessarily government owned	instrument for checking on government and meeting other needs of society	media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see that they do	state-owned and closely controlled media existing solely as arm of state

## DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Staley. D & Davis, Denis. K. (2012). *Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, and Future, Sixth Edition*. Chicago: Wadsworth
- Griffin, Emm. (2012). *The First Look at Communication Theories*. New York: McGraw Hill
- Littlejohn, Stephen. W & Foss, Karen. A (2012). *Teori Komunikasi: Human Communication Ninth Edition*. Jakarta: Salemba Humanika
- Littlejohn, Stephen. W & Foss, Karen. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theories*. California: Sage Publication

- McQuail, Dennis. (2012). *Teori Komunikasi Massa Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika
- Siebert, Fred. S; Theodore, Peterson; Schramm, Wilbur. (1963). *Four Theories of The Press: The Authotarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concept of What the Press Should Be and Do*. Chicago: University of Illinois Press